

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN
2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

(Studi Khusus pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

Hetty Kumala Dewi, Indah Murti, Bambang Kusbandrijo

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : Hettykumala29@gmail.com

Abstrak

Kegiatan merokok sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat di Indonesia, terutama pada kalangan laki – laki remaja dan pria dewasa. Merokok dapat dilakukan dimana saja, kebanyakan orang dengan sengaja melakukan aktivitas merokok ini di tempat umum tanpa memperdulikan sekitarnya. Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah perokok tertinggi di Dunia, Indonesia menduduki peringkat ke – 3 dengan jumlah perokok terbanyak. Penelitian ini berfokus pada berhasil atau tidaknya tempat Implementasi/penerapan Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019, dengan Mahasiswa yang tidak lagi merokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan juga untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung dari penerapan implementasi kebijakan ini dengan menggunakan empat faktor keberhasilan implementasi dari Edward III. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah terwujud, tetapi untuk studi khusus di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya masih belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak ditemui Mahasiswa ataupun staff/karyawan yang merokok di area Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan kurangnya sosialisasi secara langsung dari pihak yang berwenang kepada pelaksana kebijakan tersebut.

Kata kunci : Implementasi, Kawasan tanpa asap rokok, Surabaya

Abstrak

Smoking has become a habit that cannot be separated from the people of Indonesia, especially among adolescent men and adult men. Smoking can be done anywhere, most people deliberately carry out smoking activities in public places regardless of the surroundings. Indonesia is one of the countries with the highest number of smokers in the world, Indonesia ranks 3rd with the highest number of smokers. This research focuses on the success or failure of the implementation / implementation of Surabaya City Regulation Number 2 Year 2019, with students who no longer smoke at the University of August 17, 1945 Surabaya and also to find out what are the inhibiting and supporting factors of implementing this policy by using four the success factor of Edward III's implementation. The results of this study indicate that the implementation of the Surabaya City Regulation Number 2 Year 2019 regarding No-Smoking Areas has been realized, but for a typical study at the University of August 17, 1945 Surabaya is still not well implemented, because there are still many students or staff / employees who smoke in the area of the University August 17, 1945 Surabaya, and the lack of direct socialization from the authorities to the implementers of the policy.

Keywords: Implementation, non-smoking area, Surabaya

Pendahuluan

Rokok adalah suatu kebiasaan (habituation) dan bukan satu ketergantungan (addiction). Ada perbedaan yang sangat mendasar antara kebiasaan (habituation) dan ketergantungan (addiction). Kebiasaan adalah membiasakan diri melakukan sesuatu karena ada bahan, bila ia menghentikan kebiasaannya. Maka akan muncul gejala-gejala psikis dari dalam dirinya. Sedangkan ketergantungan, sebagaimana ketergantungan heroin ataupun kokain adalah ketergantungan fisik dan psikis yakni fisik pun menjadi terbiasa untuk mengkonsumsi suatu bahan yang ada. Dengan demikian, dengan ketiadaan bahan tersebut, selain menimbulkan gejala-gejala psikis, juga membuat fisiknya menjadi lemah untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas rutin.

Perilaku merokok adalah aktivitas seseorang yang merupakan respons orang tersebut terhadap rangsangan dari luar yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk merokok dan dapat diamati secara langsung. Saat ini kegiatan merokok sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Indonesia, terutama pada kalangan laki – laki remaja dan pria dewasa. Merokok dapat dilakukan dimana saja, kebanyakan orang dengan

sengaja melakukan aktivitas merokok ini di tempat umum tanpa memperdulikan sekitarnya.

Kota Surabaya telah menetapkan peraturan yang mengatur kawasan tanpa rokok, yaitu peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019, yang telah di diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan walikota Surabaya. Dalam peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 pada Bab 2 pasal 3 tercantum kawasan tanpa rokok meliputi sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas,dll), tempat proses belajar mengajar (sekolah), arena tempat bermain anak, tempat ibadah (masjid,gereja,dll), angkutan umum tertentu (bis, kereta api), tempat kerja, dan tempat lainnya. Pada penelitian ini lokasi penelitian akan dilakukan di salah satu tempat belajar mengajar yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan berdasarkan pengamatan, sebelum adanya penerapan peraturan daerah kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 permasalahan yang terjadi di UNTAG Surabaya adalah banyaknya Mahasiswa yang merokok di kawasan UNTAG Surabaya, terutama di area luar kelas, ini merupakan hal yang sangat memperhatikan.

Kajian Teori

Kebijakan publik adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau suatu kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu universitas swasta terkenal di Surabaya yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Lokasi penelitian dipilih atas pertimbangan, barunya papan “Area Dilarang merokok” serta mencatumkan Peraturan Daerah kota Surabaya No 02

tahun 2019. Dimana peraturan dibuat dengan adanya papan tersebut secara bersamaan di tahun 2019.

Jenis yang digunakan oleh penelitian ini adalah jenis Deskriptif kualitatif. Penelitian ini ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses dari pada hasil suatu aktivitas.

Menurut Moleong (2011:157) Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Sebelum peneliti melakukan penelitian, peneliti sudah mengamati fenomena yang relevan dengan pokok bahasan peneliti yakni melakukan pengamatan

dalam implementasi kebijakan, penerapan peraturan daerah, dan pendapat para masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan seseorang yang telah dipilih. Peneliti langsung terjun ke lapangan dengan cara menanyakan terhadap informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah kota Surabaya Nomer 2 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, catatan tersebut bisa berupa dokumen berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya monumental dari seseorang. Peneliti menggunakan media cetak dengan media elektronik sebagai bahan bukti data yang relevan. Adapun dokumentasi yang

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah naskah peraturan daerah, foto foto, serta hasil wawancara.

penelitian ini memfokuskan pada berhasil atau tidaknya tempat Implementasi/penerapan Peraturan Daerah kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019, dengan Mahasiswa yang tidak lagi merokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan juga untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung dari penerapan implementasi kebijakan ini.

Hasil Data

Pada penelitian ini telah dijelaskan bahwa peneliti menggunakan teori dari George C. Edward III yang mengungkapkan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakn dipengaruhi oleh empat faktor, yang pertama adalah komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga disposisi dan yang terahir adalah struktur birokrasi. Seluruh faktor tersebut akan menentukan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuannya atau tidak.

1. Komunikasi

Dalam implementasi kebijakan komunikasi terdiri dari 3

dimensi yaitu dimensi transformasi (transmission), dimensi kejelasan (clarity), dan dimensi konsistensi (consistency).

Dimensi Transformasi

Dimensi transformasi dalam komunikasi pelaksanaan kebijakan mengharuskan pelaksana kebijakan memberitahukan tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. Penjelasan kebijakan mencakup tujuan yang akan dicapai dan persiapan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang mempunyai wewenang untuk menyampaikan informasi adanya penerapan kebijakan kawasan tanpa asap rokok melalui komunikasi secara non

verbal seperti pemasangan papan yang berisikan kawasan tanpa asap rokok ataupun lambang dilarang merokok. Hal tersebut membuktikan bahwa pihak Kampus sudah memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang berada di area Kampus.

Dimensi Kejelasan

Pada dimensi kejelasan, komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan diharapkan dapat diterima secara jelas oleh sasaran kebijakan. Kejelasan yang diterima oleh sasaran kebijakan sangat penting agar mengetahui tujuan dan maksud dari kebijakan tersebut. Hasil wawancara dengan Mahasiswa, Mahasiswi dan juga Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengenai pelaksanaan

kebijakan kawasan tanpa rokok menunjukkan bahwa mereka mengetahui adanya penerapan ini hanya sebatas membaca papan kawasan tanpa asap rokok, bukan melalui sosialisasi secara langsung dari pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sehingga masih belum jelas bagaimana penerapan kebijakan itu berlangsung.

Dimensi Konsistensi

Dalam implementasi kebijakan menjelaskan bahwa dimensi konsistensi menginginkan implementasi kebijakan berlangsung efektif dengan cara pemberian perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas agar kebijakan yang diterapkan tidak membingungkan. Dari hasil wawancara Mahasiswa, Mahasiswi dan juga Dosen UNTAG menyatakan bahwa seluruh

area Kampus merupakan kawasan tanpa asap rokok. Hal itu membuktikan bahwa pihak kampus sudah konsisten meletakkan papan kawasan tanpa asap rokok di seluruh area Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya supaya dapat dibaca dan diterapkan oleh masyarakat yang berada di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III sumber daya kewenangan menjadi kekuatan oleh suatu lembaga untuk mempengaruhi lembaga tersebut dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan tersebut sangat penting ketika suatu lembaga dihadapkan suatu masalah dan harus segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Dalam hal ini pihak kampus mempunyai wewenang untuk membentuk suatu pengawasan terhadap pelanggar kebijakan, namun dari hasil wawancara peneliti pihak kampus belum membuat atau membentuk pengawas khusus untuk para pelanggar kebijakan, namun beberapa jawaban

informan menunjukkan bahwa nantinya jika dibentuk pengawasan khusus maka Satpam lah yang memiliki wewenang mengawasi dan menegur pelanggar peraturan tersebut.

3. Disposisi

Pada hasil wawancara peneliti terhadap sikap informan tentang adanya penerapan kebijakan kawasan tanpa asap rokok menunjukkan sikap menerima ataupun mendukung penuh terhadap adanya penerapan kebijakan tersebut. Namun sikap informan dari Mahasiswa dan Mahasiswi saat melihat adanya orang yang melanggar kebijakan tersebut menunjukkan sikap acuh tak acuh karena menurutnya itu adalah urusan pribadi masing – masing. Berbeda dengan informan dari Dosen yang menunjukkan sikap yang tegas terhadap pelanggar peraturan tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Pembagian tugas yang tidak terlalu rumit dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ternyata masih belum

bisa dimaksimalkan. Masih banyak pelanggaran yang terjadi di kampus tersebut. Hal itu dibuktikan dari jawaban wawancara peneliti terhadap informan bahwa pihak kampus belum membentuk satuan khusus untuk mengawasi pelanggar kebijakan tersebut. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belum ada upaya dari pihak kampus yang mampu mengatasi permasalahan terkait dengan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, bahkan jawaban informan mengenai sanksi yang diberikan pihak kampus terhadap pelanggar peraturan tersebut belum jelas.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu Bagaimana implementasi kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Apa saja faktor pendukung juga penghambat dari penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa

Rokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi penerapan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah terwujud, tetapi untuk studi khusus di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya masih belum terlaksana dengan baik, karena masih banyak ditemui Mahasiswa ataupun staff/karyawan yang merokok di area Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan kurangnya sosialisasi secara langsung dari pihak yang berwenang kepada pelaksana kebijakan tersebut.
2. Faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah
 - Banyaknya papan yang berisikan kawasan tanpa asap rokok juga lambang dilarang merokok yang dipasang hampir setiap gedung, sehingga Mahasiswa atau siapapun yang berada di kampus dapat mengetahui

kebijakan tersebut dan menerapkannya.

- Respon dari beberapa pihak yang bertindak tegas (menegur) terhadap pelanggar kebijakan tersebut.
3. Faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya adalah
 - Belum adanya tempat khusus untuk merokok, sehingga ketika ada beberapa pihak yang ingin merokok masih ditempat sembarangan.
 - Sikap acuh tak acuh jika melihat ada beberapa pihak yang melanggar kebijakan tersebut.
 - Kurangnya pengawasan intensif dari pihak berwenang dan tidak adanya pemberian sanksi terhadap pelanggar kebijakan sehingga para pelanggar tidak akan ketakutan/ berhati – hati jika ingin merokok di area

Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya.

Saran

Implementasi kebijakan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang terjadi saat ini belum bisa maksimal, maka disarankan kepada seluruh warga yang berada di area Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ikut serta berperan dalam meningkatkan penerapan kebijakan tersebut dengan kesadaran masing-masing, karena kesehatan sangat penting bagi semua umat manusia, dan merokok juga dapat membunuh manusia secara perlahan. Untuk pihak Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebaiknya menyediakan tempat khusus untuk merokok atau biasa orang bilang *Smoking area* supaya jika ada beberapa pihak yang ingin merokok, mereka akan menuju tempat tersebut dan tidak merokok di area kawasan tanpa asap rokok

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, P. M. (2008). *Dasar - dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Santoso, Y. (2015). Perilaku merokok. *Etheses-UIN-Malang*.
- Sari, R. (2017). Implementasi kawasan tanpa asap rokok. *Repository UMP*, 1.